

Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

(Studi Kasus di Prov. Jawa Tengah Periode 2017-2020)

Widhea Indira Utomo¹⁾, Maria R.U.D Tambunan²⁾

^{1,2)}Universitas Indonesia

widheaindirautomo@gmail.com , maria.tambunan@ui.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 10 April 2024

Disetujui : 30 April 2024

Dipublikasikan : 30 April 2024

ABSTRACT

This Research aims to determine the effect of fiscal decentralization, investment and labor force participation rate on the economic growth of districts or cities in one of the largest provinces on java. This analysis consists of several variables including Investment, labor force participation rate and fiscal decentralization that uses income and expenditure indicators. This study also uses Gross Regional Domestic Product (GRDP) indicators at constant prices for economic growth with total of observations are 140 data from 35 district or cities in Central Java Province for the 2017-2020 period with complete data ownership. The data that used in this study were collected and processed using multiple linear analysis methods to determine simultaneously and partially between fiscal decentralization, investment, labor force participation and economic growth. The research results show that Fiscal Decentralization and Investment have proven to significantly increase economic growth in the Province of Central Java. However, the Labor Force Participation Rate (TPAK) in Central Java Province does not have a significant effect on the economic growth. Regional Income and Regional Expenditure that are well managed will have a positive impact on the economic growth of each region. This can be optimized by taking advantage of current technological developments and demographic bonuses where there is a balance in overcoming good governance, then this will create productivity which can have an impact on economic that more effective and efficient.

Keywords: Fiscal Decentralization, Regional Revenue, Regional Expenditure, Investment, Labor Force Participation Rate (TPAK)

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah menjadi bukti nyata bahwa pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah telah mencapai keberhasilan. Pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 merupakan salah satu visi pemerintah untuk menciptakan ekonomi Indonesia yang lebih modern dan inovatif guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Kemajuan teknologi dan bonus demografi yang ada saat ini memberikan peluang yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya bonus demografi yang mana jumlah masyarakat pada usia produktif lebih tinggi dibandingkan non-produktif, maka hal ini memiliki potensi yang sangat besar untuk memperluas kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk mengoptimalkan fungsi publik mulai dari proses administrasi kependudukan, kesehatan bahkan hingga pendidikan. Terlebih lagi sesuai dengan visinya untuk mencapai Indonesia Emas, maka sistem otonomi daerah yang merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola kebijakan yang berkaitan dengan

kepentingan lokal (Annisa, 2023) menjadi pendukung efektif untuk meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Dengan begitu melalui pelaksanaan Desentralisasi fiskal bersamaan dengan Otonomi Daerah, suatu kebijakan dinilai akan sangat efektif sebab sistem pemerintahan dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peran dan wewenangnya masing-masing dalam menetapkan prioritas pembangunan.

Desentralisasi fiskal telah di implementasikan oleh hampir seluruh negara termasuk Indonesia. Tujuan dari desentralisasi fiskal sendiri adalah untuk menciptakan efisiensi dan meningkatkan alokasi nasional, memperbaiki struktur fiskal secara keseluruhan serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi konstituen dalam melakukan pengambilan keputusan (Badrudin, 2012). Desentralisasi fiskal juga memiliki peran yang penting terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebagai pendukung untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara mandiri sesuai dengan potensi pada daerahnya masing-masing (Christia & Ispriyarso, 2019).

Pada dasarnya penyerahan kekuasaan kepada pemerintah daerah telah dilakukan sejak 2001 yang mana tujuannya untuk dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemahaman akan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih efektif dan efisien (Pasaribu, 2022). Salah satu dampak diberlakukannya desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi positif signifikan pada suatu daerah. Dimana dalam hal ini Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kharisma, 2013) bahwa peparuh desentralisasi fiskal pada era 1995-2000 dari sisi penerimaan dan pengeluaran berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebaliknya pada era 2001-2004 setelah kekuasaan diserahkan kepada pemerintah daerah, pengaruh desentralisasi fiskal secara efektif mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam upaya menciptakan pembangunan berkelanjutan dan memaksimalkan desentralisasi fiskal, penerimaan dan pengeluaran daerah menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Desentralisasi menuntut pemerintah daerah untuk dapat menghitung setiap penerimaan daerah dan juga bersikap adil dalam melakukan pengambilan keputusan atas pengeluaran yang dilakukannya untuk menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan untuk mengatur dan menjalankan urusan rumah tangganya sendiri. Penerimaan dan pengeluaran merupakan dua indikator yang banyak digunakan untuk mengukur pengaruh desentralisasi fiskal seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Rahmanda & Fahzaalloh, 2018) dan (Rustan, 2013) bahwa penerimaan dan pengeluaran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam mengelola keuangannya, Indonesia sendiri menerapkan *Money follow function* sebagai fungsi pemerintahan dan pembiayaan dimana pembagian tugas kepada pemerintah daerah harus disertai dengan pelimpahan keuangan yang memadai. Begitupun dengan tanggung jawab atas kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengeluaran yang bertujuan memperbaiki pelayanan publik. Oleh karenanya diperlukan pendapatan yang optimal untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan yang lebih efektif.

Selain dari pada penerimaan dan pengeluaran daerah yang harus menjadi perhatian pemerintah, disisi lain terdapat investasi yang juga memiliki peranan penting dalam menopang pembangunan berkelanjutan (Sari L. F., 2019). Dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat menjaga iklim investasi sebab pengaruh dari investasi sendiri sangat besar terhadap Indonesia sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Bappenas, 2017). Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menarik para investor untuk dapat berinvestasi adalah dengan melakukan pengembangan sektor-sektor menarik bagi para investor.

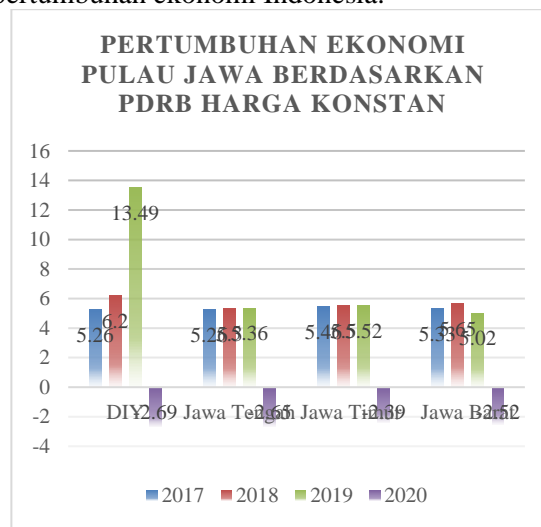
Dalam upaya mengembangkan berbagai sektor menarik, pemerintah menitikberatkan harapan pada produktifitas Sumber Daya Manusia yang lebih efektif dan efisien. Namun dalam praktiknya, banyak permasalahan yang ditimbulkan dari desentralisasi fiskal, diantaranya terkait kesenjangan, sistem harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah yang mengalami kendala, korupsi yang berpengaruh pada stabilitas politik serta terkait pengelolaan dana daerah yang kurang optimal (Mukarromah, 2019). Kondisi seperti ini dapat disebabkan karena adanya sumber daya yang berbeda dan kurang berkualitas dari setiap daerah. Oleh karenanya, sumber daya manusia yang kompeten sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

Dengan didukung oleh kondisi saat ini dimana perkembangan digitalisasi ekonomi bersamaan dengan bonus demografi yang menunjukkan bahwa usia produktif lebih mendominasi, artinya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja juga memiliki kontribusi untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi (Bintoro & Rahmawati, 2019). Berdasarkan penelitian (Wahyuningtias, 2019) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah. Hal ini dapat dijadikan suatu peluang bagi pemerintah daerah untuk memilih dan memperkerjakan sumber daya yang kompeten untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang positif, stabil dan berkembang mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi dalam suatu negara berhasil dilaksanakan dengan baik. Kondisi ekonomi yang positif harus dapat dipertahankan oleh setiap negara untuk menopang pembangunan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi yang positif tidak terlepas dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) khususnya dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran daerah. Dimana wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berperan penting dalam hal ini sebab harapannya kebijakan yang nantinya dibuat akan lebih efektif. Seperti kutipan (Ivanyna & Shah, 2013) yang menyatakan bahwa desentralisasi mendukung suatu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi dekat dengan masyarakat. Hal ini sebab pemerintah daerah turun secara langsung untuk memantau kebutuhan dan keinginan dari masyarakatnya sehingga nantinya penerimaan dan pengeluaran daerah akan digunakan secara lebih optimal, adil dan merata tanpa adanya ketimpangan.

Namun demikian, seluruh negara termasuk Indonesia belum lama ini mengalami pandemic Covid-19 yang menyebabkan pendapatan pemerintah baik pusat maupun daerah ikut terimplikasi (Nurhadi, Nurlailah, & Syamsul, 2022). Dalam hal ini tercatat bahwa wilayah yang mengalami tekanan penurunan paling berat yaitu pada wilayah Jawa yaitu sebesar 32,04 persen (Zuraya, 2020). Hal ini tentu sangat mempengaruhi perekonomian nasional mengingat Pulau Jawa berperan sebagai pendorong terbesar laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa Berdasarkan PDRB Harga Konstan Jawa Tengah Periode 2017-2020.

Sumber: Jateng.bps.go.id

Berdasarkan grafik, apabila seluruh pulau jawa dilakukan perbandingan maka didapatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB harga konstan bahwa pertumbuhan ekonomi pada wilayah DIY sebesar 5,565 persen, Jawa Tengah sebesar 3,3175 persen, Jawa Timur sebesar 3,5225 persen, dan Jawa Barat sebesar 3,37 persen. Melalui rata-rata tersebut telah diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi terendah diduduki oleh Jawa Tengah.

Namun demikian, berdasarkan data BPS Jawa Tengah, diperoleh jumlah penduduk pada Kab/Kota Prov. Jawa Tengah Periode 2017-2019 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 1. Jumlah Penduduk pada Kab/Kota Prov. Jawa Tengah Periode 2017-2019

No.	Keterangan	2017	2018	2019
1	Penduduk			
	Laki-laki	16.959.136	17.075.452	17.189.147
	Perempuan	17.238.964	17.357.074	17.472.154
	Jumlah Penduduk	34.198.100	34.432.526	34.661.301

2 Komposisi Penduduk			
0-14 Tahun			
Laki-laki	25,03%	24,74%	24,38%
Perempuan	23,38%	23,06%	22,74%
15-64 Tahun			
Laki-laki	67,57%	67,56%	67,62%
Perempuan	67,71%	67,78%	67,84%
>65 Tahun			
Laki-laki	7,40%	7,70%	8,00%
Perempuan	8,91%	9,17%	9,42%

Sumber: jateng.bps.go.id

Dengan selalu meningkatnya jumlah penduduk dimana bersamaan dengan adanya perkembangan digitalisasi dan bonus demografi, seharusnya daerah Jawa Tengah memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Namun sebaliknya, daerah Jawa Tengah justru memiliki pertumbuhan ekonomi yang paling rendah dibandingkan dengan wilayah Jawa lainnya. Kondisi tersebut dapat berimplikasi pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesenjangan sosial yang semakin besar (Maulana, 2022). Dampaknya, kesejahteraan masyarakat dapat menurun yang dimana apabila tidak diatasi dengan seksama maka juga akan berdampak pada negara. Sehingga dalam hal ini diperlukan analisis mendalam terhadap pengaruh desentralisasi fiskal, investasi dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2020 untuk mengetahui kebijakan dan sikap efektif seperti apa yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah Jawa Tengah untuk dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi secara efektif. Harapannya penelitian ini dapat bermanfaat serta dapat membantu pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

STUDI LITERATUR

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat sebab melalui pertumbuhan ekonomi, masyarakat dapat menjangkau barang dan jasa sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu alat ukur yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja ekonomi dalam suatu wilayah (Fitriani, 2013). Dalam hal ini PDRB dibedakan menjadi dua bentuk yang diantaranya adalah PDRB atas harga konstan dan atas harga berlaku. Menurut (Asmat, 2023) PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar sedangkan PDRB atas harga berlaku menggambarkan suatu nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.

Desentralisasi Fiskal

Salah satu bentuk dari desentralisasi fiskal adalah berupa sumber penerimaan bagi setiap daerah yang mana hal ini berfungsi untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Sumber penerimaan daerah dapat diterima melalui alokasi keuangan yang dilakukan oleh pusat kepada daerah dalam bentuk alokasi/transer fiskal. Alokasi keuangan pusat-daerah merupakan transfer berupa uang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk menjamin terlaksananya pembangunan yang telah direncanakan. Transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat memberikan dampak positif terhadap efisiensi dari pengelolaan fiskal dan pemerataan penyediaan layanan public kepada seluruh masyarakat daerah. Sehingga sebagai upaya dalam memaksimalkan efisiensi dari penerimaan yang diperoleh daerah, maka desain kelembagaan pemerintah pusat harus mempertimbangkan kondisi makroekonomi serta menyesuaikan desain tersebut dengan situasi dan kondisi yang terjadi di setiap pemerintahan guna meminimalisir dampak negatif yang nantinya terjadi.

Disisi lain, sumber pendapatan daerah dapat diterima melalui Pendapatan Asli Daerah yang mana dapat diterima melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada para penduduk yang mendiami wilayah yuridiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, pajak daerah diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan

disetujui oleh Lembaga perwakilan rakyat serta dipungut oleh Lembaga yang berada dalam struktur pemerintah daerah yang bersangkutan sehingga seluruh penduduk yang berinteraksi dengan objek pajak maka wajib dikenakan pajak.

Sedangkan Retribusi daerah merupakan komponen lain dari konsep pendapatan asli daerah dimana terdapat kaitannya dengan pembebanan pada masyarakat atau penduduk lokal terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat melakukan pungutan atas produksi barang, jasa atau perizinan tertentu lalu kemudian memberikan beban kepada mereka yang memperoleh hal tersebut. Berbeda dengan pajak daerah, objek pajak pada retribusi daerah memiliki keberagaman dimana dalam hal ini siapapun tingkatan pemerintah yang memberikan layanan dapat memungut retribusi. Disamping itu penetapan tarif pada retribusi daerah lebih mudah dan fleksibel dan potensinya yang lebih beragam. Di Indonesia sendiri jenis dari retribusi daerah terbagi menjadi tiga dan diklasifikasikan berdasarkan objeknya yang diantaranya retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan.

Desentralisasi Fiskal Terhadap Petumbuhan Ekonomi

Desentralisasi fiskal dapat memberikan fungsi yang sangat besar khususnya bagi pemerintah daerah sehingga mampu menciptakan kemandirian dan meningkatkan kualitas pelayanan publik guna tercipta tata kelola yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan perekonomian dalam suatu negara. Pada dasarnya, terdapat dua kategori pada desentralisasi fiskal, diantaranya adalah fiskal generasi pertama yang berorientasi pada pengadaan barang publik lokal secara optimal ketika adanya keseimbangan manfaat yang terjadi antara produsen dan konsumen sehingga diperoleh efisiensi pareto dan fiskal generasi kedua yang mana terdapat perluasan dengan adanya insentif fiskal serta politik yang bertujuan untuk menunjukkan pentingnya kinerja ekonomi (Canh & Thanh, 2019). Perkembangan teknologi dan bonus demografi yang terjadi saat ini didukung dengan adanya desentralisasi fiskal dan peran yang sangat positif sebagai pendukung dalam peningkatan kinerja ekonomi, hal ini sesuai dengan temuan (Chang, Hao, & Sun, 2016) yang menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi secara optimal. Karena pada dasarnya desentralisasi yang diberlakukan juga dapat meningkatkan lingkungan bisnis dan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap negara khususnya negara dengan penghasilan rendah (Chiang & Escaleras, 2017). Untuk mencapai desentralisasi fiskal yang efektif dan efisien maka juga diperlukan tata kelola public yang baik oleh pemerintahan daerah. Hal ini sesuai dengan teori dari (Canh & Thanh, 2019) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal memerlukan adanya keterkaitan antara tata kelola public yang baik dari pemerintahan daerah sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat.

Sebagai negara yang menganut sistem demokratis, maka dalam praktiknya sangat penting apabila desentralisasi fiskal dilakukan dengan berfokus pada keadilan dan tidak mengedepankan kepentingan politik guna meningkatkan partisipatif dalam aktivitas perekonomian. Dalam teori yang dikemukakan oleh (Hankla, Ortiz, Rodriguez, & Vazquez, 2018) menunjukkan bahwa interaksi desentralisasi yang demokratis dimana pemilihan umum daerah dan sentralisasi partai akan memberikan pelayanan terbaik bagi kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, Tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi berada pada negara dengan tingkat pembangunan yang tinggi dimana kelembagaan dan desentralisasi administrasi memiliki kualitas yang tinggi dan mengarah pada meningkatnya efisiensi pada sektor publik (Chernova, Dubrovina, Fabus, & Zyma, 2019).

Dampak Diberlakukannya Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Makroekonomi dan *Sustainability*

Desentralisasi fiskal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi stabilitas makroekonomi (Dehtyarova, Lyulyov, Melnyk, Pimonenko, & Sinevicien, 2018). Dalam upaya mencapai stabilitas ekonomi, maka hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pendapatan negara yang berasal dari perpajakan. Sesuai dengan teori (Aslim & Neyapti, 2017) yang mana menunjukkan bahwa kenaikan tarif pajak dapat menyebabkan desentralisasi fiskal meningkat secara optimal. Permasalahan utama yang terjadi dalam pemungutan pajak adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari masyarakat sendiri terkait pentingnya dalam membayar pajak.

Selain itu, edukasi dan regulasi dari pemerintah yang masih kurang sehingga masyarakat tidak merasa diuntungkan saat melakukan pembayaran pajak.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak secara lebih efektif dan efisien, pemanfaatan teknologi melalui penyederhanaan sistem administrasi perpajakan seperti penggunaan faktur pajak dan SPT online sangat penting untuk diedukasikan kepada masyarakat guna tercipta kemudahan masyarakat dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu regulasi dan sumber daya manusia secara internal harus lebih ditingkatkan guna memaksimalkan produktivitas dari pemungut pajak dalam melayani dan menangani keluhan wajib pajak dibidang administrasi.

Terhadap Inequality dan Disparitas

Kesenjangan yang terjadi disebabkan karena adanya ketidakadilan terhadap keberlangsungan demokrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada awal reformasi, desentralisasi yang diberlakukan oleh pemerintah memberikan dampak yang buruk terhadap pembangunan daerah namun setelah adanya penyesuaian praktik dari desentralisasi di Indonesia, pemberlakuan desentralisasi mulai menunjukkan hasil yang positif dimana terjadi penurunan disparitas pada wilayah (Firman, Hudalah, & Talitha, 2020). Dalam hal ini, kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah menjadi hal yang sangat krusial dalam penyelesaian masalah yang ada serta dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik sehingga dapat menciptakan pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien.

Terhadap Infrastruktur Sosial

Dengan menganut tradisi demokrasi lokal, desentralisasi fiskal menyebabkan peningkatan yang signifikan terhadap pengeluaran masyarakat terkait infrastruktur sosial seperti pendidikan dan kesehatan masyarakat (Pal & Wahhaj, 2017). Investasi dalam infrastruktur sosial berupa pendidikan dan kesehatan memberikan dampak yang sangat positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bertumpu pada perkembangan teknologi dan bonus demografi yang memberikan suatu peluang besar terhadap pertumbuhan ekonomi oleh karenanya kesehatan, keterampilan dan kualitas diri dari SumberDaya yang ada dalam suatu wilayah juga harus dimaksimalkan.

H₁ : Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Investasi

Investasi daerah terbagi atas dua kategori dimana terdapat investasi jangka panjang yang terdiri dari investasi permanen dan non-permanen. Investasi permanen merupakan kerjasama yang terjadi antara daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penyertaan modal, pemanfaatan asset daerah dan investasi permanen lain yang berkaitan dengan pemerintah daerah yang berguna untuk meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan Investasi non-permanen terdiri atas surat jangka panjang dan obligasi dimana investasi tersebut memiliki tanggal jatuh tempo. Kategori lainnya dari investasi jangka pendek ini dapat berupa deposito berjangka seperti SUN dan SBI.

Disisi lain terdapat investasi dalam negeri dan investasi asing yang dinilai dapat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (Kenda & Nadzir, 2023). Investasi asing dipercaya memberikan dampak yang cukup signifikan sebab menjadi salah satu sumber pembiayaan terhadap pembangunan dalam suatu wilayah baik dari sisi teknologi, infrastruktur maupun dalam hal sumber daya. Keberadaan investasi asing berpotensi menjadikan ekonomi tumbuh melalui produktivitas maksimal yang tercipta sebab meningkatnya arus modal dan lapangan pekerjaan antar negara. Tidak hanya itu, kerja sama yang dilakukan antar negara tersebut dipercaya dapat memperluas bisnis pengusaha keranah internasional dan memperluas lapangan pekerjaan yang dampaknya kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai secara maksimal.

H₂: Investasi berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang termasuk kedalam angkatan kerja yakni penduduk yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan dengan total penduduk pada usia kerja (Wahyuningtias, 2019). Tingkat partisipasi

angkatan kerja dapat memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara sebab sumber daya manusia merupakan modal utama Bergeraknya suatu pembangunan. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kindangen, Mirah, & Rororng, 2020) bahwa TPAK memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta mampu mengurangi angka kemiskinan dalam suatu wilayah. Tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja dapat mendorong produktivitas masyarakat dalam melakukan produksi barang dan jasa begitupun sebaliknya, rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja mengindikasikan bahwa penurunan besarnya presentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2023).
H3: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Colaborative Governance

Berdasarkan yang dikemukakan oleh (Gray, 1985) bahwa kolaborasi merupakan suatu proses berpikir dimana pihak yang terlibat didalamnya memandang beberapa aspek perbedaan dari suatu masalah serta kemudian menemukan solusi dari perbedaan tersebut. Disisi lain, Ansell dan Gash menjelaskan bahwa kolaborasi merupakan forum yang secara resmi ditujukan untuk membuat suatu keputusan publik dimana tujuan diadakannya *collaborative governance* ini adalah sebagai sarana untuk mengembangkan kerjasama antar pihak yang terlibat dalam forum untuk menciptakan pendekatan yang lebih efektif dalam pembuatan suatu kebijakan. Sehingga melalui beberapa ahli yang telah mengemukakan pendapatnya, maka *collaborative governance* dapat didefinisikan sebagai suatu pengaturan atau kondisi satu atau beberapa hal dari pihak pemerintah atau non pemerintah untuk membuat suatu keputusan secara formal dengan peserta dari forum termasuk dari non pemerintah sehingga tercipta pendekatan yang lebih efektif dalam pembuatan suatu kebijakan.

Fungsi Pemerintah

Pemerintah sebagai Lembaga yang bewenang berkewajiban untuk mengatur, membuat kebijakan serta memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat dengan mendahulukan kepentingan masyarakatnya serta mempermudah seluruh kepentingan public. Pemerintah sebagai Lembaga yang berwenang memiliki fungsi Alokasi Sumber Daya, fungsi Distribusi, fungsi Regulasi dan fungsi Stabilisasi. Pemerintah dengan **Fungsi Alokasi Sumber Daya**, dimana pemerintah sebagai Lembaga yang berwenang berkewajiban melakukan intervensi dengan ikut serta memperbaiki distorsi ekonomi seperti menciptakan persaingan pasar yang adil dengan melahirkan beberapa kompetitor sehingga tidak terjadi monopoli dan memberikan kebijakan yang adil atas pemungutan pajak serta distribusi pendapatan untuk mengatasi kesenjangan terhadap suatu kelompok bisnis dan masyarakat. Selain itu pemerintah juga harus melakukan evaluasi atas barang atau jasa public yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta sehingga dalam pengalokasian sumber daya, pemerintah dapat melakukannya secara efektif dan efisien.

Disamping itu, pemerintah dengan **Fungsi Distribusi** yang mana pendapatan harus menjadi sebuah perhatian dalam hal ini pemerintah harus menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat guna memitigasi terjadinya disparitas sosial yang mana apabila hal ini terjadi maka akses terhadap barang ataupun jasa bagi masyarakat tidak mampu menjadi terbatas. Disisi lain pemerintah dengan **Fungsi Regulasi** dimana Dalam upaya menciptakan regulasi yang bertumpu pada asas keadilan maka pemerintah dengan tata kelola yang baik sangat diperlukan untuk mewujudkannya. Selain itu, pemerintah harus dapat mengatur kegiatan ekonomi sehingga dapat mewujudkan stabilitas makro ekonomi dan tercipta pembangunan ekonomi berkelanjutan yang lebih baik

Selain itu pemerintah dengan **Fungsi Stabilisasi** berkewajiban untuk menjaga stabilitas ekonomi yang ada dalam suatu negara secara fleksibel guna memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dan diberlakukan bersifat adil dan tidak merugikan masyarakat. Pada fungsi stabilisasi ini, pemerintah daerah tidak memiliki peran yang besar untuk mengatur sebuah kebijakan moneter. Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga maupun tingkat inflasi dalam suatu negara karena apabila pada masing-masing daerah diberikan kewenangan untuk melakukan kebijakan yang diinginkannya maka akan berdampak pada penetapan harga pajak yang berbeda pada masing-masing daerah sehingga memberikan peluang bagi penduduk untuk melakukan migrasi guna memperoleh penghasilan yang lebih besar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang mana pada dasarnya metode deskriptif digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan fokus dari penelitian sesuai dengan data dan fakta yang terjadi. Data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang didokumentasikan melalui database BPS propinsi Jawa Tengah dan literature lain yang mendukung data. Penelitian ini terdiri atas empat variable yang diantaranya variable (Y) yang merupakan variable terikat atau dependent variable yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan variable (X) yang merupakan variable bebas atau independent variable dalam penelitian ini adalah Penerimaan (X1), Pengeluaran (X2), Investasi (X3) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X4) yang bersifat mempengaruhi dan merupakan variable penyebab atas perubahan pada variable dependen.

Model Penelitian

Dalam penelitian ini, variable dependen yaitu pertumbuhan ekonomi dan variable independent yaitu penerimaan, pengeluaran, investasi dan TPAK maka data pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan model penelitian seperti sebagai berikut:

$$Y = C + X1 + X2 + X3 + X4 + e$$

Dimana, pada persamaan tersebut : Y adalah pertumbuhan ekonomi, C adalah Constata, X1 adalah Penerimaan, X2 adalah Pengeluaran, X3 adalah Investasi, X4 adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan e adalah error.

Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

Populasi dalam penelitian ini didapatkan melalui data BPS propinsi Jawa Tengah dimana terdapat 35 kab/kota dengan kepemilikan data yang lengkap pada periode 2017-2020 Kemudian data diolah menggunakan STATA. Sampel dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan tujuan dan Batasan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang datanya terdapat pada BPS periode 2017-2020.
2. Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dengan kepemilikan data secara lengkap dan dapat diakses selama periode 2017-2020.

Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini kemudian dikumpulkan pada Microsoft Excel dan diolah menggunakan software STATA. Adapun metode Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sampel Penelitian Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2020

No.	Kab/Kota	No.	Kab/Kota	No.	Kab/Kota
1.	Cilacap	15.	Grobogan	29.	Brebes
2.	Banyumas	16.	Blora	30.	Kota Magelang
3.	Purbalingga	17.	Rembang	31.	Kota Surakarta
4.	Banjarnegara	18.	Pati	32.	Kota Salatiga
5.	Kebumen	19.	Kudus	33.	Kota Semarang
6.	Purworejo	20.	Jepara	34.	Kota Pekalongan
7.	Wonosobo	21.	Demak	35.	Kota Tegal
8.	Magelang	22.	Semarang		
9.	Boyolali	23.	Temanggung		
10.	Klaten	24.	Kendal		
11.	Sukoharjo	25.	Batang		
12.	Wonogiri	26.	Pekalongan		
13.	Karanganyar	27.	Pemalang		
14.	Sragen	28.	Tegal		

Sumber: jateng.bps.go.id

HASIL

Populasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan analisis pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota pada provinsi Jawa Tengah dengan kepemilikan data yang lengkap dan dapat diakses pada periode 2017-2020. Dalam hal ini variable

independent yang digunakan adalah penerimaan, pengeluaran, Investasi dan TPAK. Pemilihan variabel tersebut dianggap dapat memprediksi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap desentralisasi fiskal. Data menunjukkan bahwa terdapat 35 Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah dengan kepemilikan data yang lengkap dan dapat diakses melalui BPS.

Pengujian Asumsi Klasik

Apabila model dalam suatu uji multikolinearitas memiliki korelasi nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF (Variance Inflation Factor) kurang dari 10,00 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 3. Uji Asumsi Klasik

Variable	VIF	1/VIF
Pr	20706.48	0.000048
Pl	20459.96	0.000049
Inv	2648.06	0.000378
Tpak	16.60	0.000249
	Mean VIF	10957.77

Sumber: Olah Data Penulis (2021)

Dalam uji asumsi klasik pada penelitian ini didapatkan bahwa model pada pendekatan tersebut terkena multikolinearitas dengan nilai VIF sebesar 10957,77 untuk variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi.

Pengujian Kriteria Statistik

Tabel 4. Hasil Estimasi Regresi

Variable Independen	Regresion Model					
	PLS		FE		RE	
	Koefisien	Prob.	Koefisien	Prob.	Koefisien	Prob.
PN	1,6154	0,009	2,64675	0,0060	1,61537	0,008
PL	-1,8672	0,002	-0,38184	0,6570	-1,86719	0,002
INV	0,2398	0,000	0,33113	0,0000	0,23977	0,000
TPAK	-1,3597	0,506	-2,21734	0,4950	-1,35966	0,505
Number Of Observation	140		140		140	
Adjusted R Squared	0,30650		0,48400		0,32650	
Prob (F-Restricted)	0,007		0,0038		0,000	
Tingkat Signifikansi	1%					
	5%					
	10%					

Sumber: Olah Data Penulis (2021)

Pada table 4 menjelaskan bahwa hasil estimasi regresi yang menunjukkan bahwa probabilitas pada F-Statistik adalah sebesar 0,000. Hal ini menggambarkan bahwa model pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini lebih kecil dibandingkan dengan a sebesar 0,01 sehingga model dalam pendekatan ini dianggap memiliki model pendekatan yang baik. Dalam table juga menunjukkan bahwa data memiliki nilai Adjusted R Square sebesar 32,65% yang mengidentifikasi bahwa dalam penelitian ini menjelaskan variabel dependen yaitu Desentralisasi Fiskal sebesar 32,64%. Sementara sisanya yaitu 67,35% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Adjusted R yang ditunjukkan dalam table dapat diketahui dengan merobustkan nilai R-Square. Dimana dalam hal ini dapat diketahui juga bahwa, model penelitian setelah dilakukan robust seperti sebagai berikut:

Desentralisasi Fiskal :

$$5,410259 + 1,615374 + (-1,86719) + 0,2397704 + (-1,359664)$$

Interpretasi Output Penelitian

Hasil penelitian Lagrange Multiplier Test dan Hausman Test telah menghasilkan metode REM. Random Effect yang telah dirobustkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. Output Regresi dengan Metode REM

Variabel	Random Effect Model	
	Koefisien	P-Value
PND	1,615374	0,045
PLD	-1,86719	0,018
In	0,2397704	0,000
Tpak	-1,359664	0,426
Number Of Observation	140	
R Squared	0,0070	
Prob (F-Statistic)	0,000	
Tingkat Signifikansi :		
a : 1%		
a : 5%		
a : 10%		

Sumber: Olah Data Penulis (2021)

Dari hasil regresi pada table yang telah dilakukan dengan metode random effect yang telah dirobustkan maka diperoleh hasil penelitian seperti sebagai berikut :

Tabel 6. Output Regresi dengan Metode Random Effect

Variabel Independen	Hasil Penelitian	Arah	Tingkat Signifikansi
Penerimaan	Memiliki Pengaruh	Positif	Level of Significant 5%
Pengeluaran	Memiliki Pengaruh	Negatif	Level of Significant 5%
Investasi	Memiliki Pengaruh	Positif	Level of Significant 1%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tidak Memiliki Pengaruh	-	

.Sumber: Olah Data Penulis (2021)

Pengaruh Penerimaan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil dari output regresi dengan metode Random Effect pada variabel independent penerimaan daerah memiliki probabilitas 0,045 dimana hal ini membuktikan bahwa penerimaan tidak berada dilevel signifikansi sehingga dapat disimpulkan nilai probablitas lebih kecil dibandingkan signifikansi (0,045<0,05) yang berarti hubungan penerimaan terhadap desentralisasi fiskal memiliki pengaruh signifikan. Dalam tabel ditunjukkan bahwa koefisien dari penerimaan bernilai positif, hal ini menggambarkan bahwa setiap terjadinya peningkatan penerimaan daerah, maka akan meningkatkan ekonomi sebesar 1,615374.

Pengaruh Pengeluaran Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil dari output regresi dengan metode Random Effect pada variabel independent pengeluaran daerah memiliki probabilitas 0,018 dimana hal ini membuktikan bahwa pengeluaran tidak berada dilevel signifikansi sehingga dapat disimpulkan nilai probablitas lebih kecil dibandingkan signifikansi (0,045<0,05) yang berarti hubungan pengeluaran terhadap desentralisasi fiskal memiliki pengaruh signifikan. Dalam tabel ditunjukkan bahwa koefisien dari pengeluaran bernilai negatif, hal ini menggambarkan bahwa setiap terjadinya peningkatan pengeluaran daerah, maka akan menurunkan ekonomi sebesar 1,86719.

Pengaruh Investasi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil dari output regresi dengan metode Random Effect pada variabel independent Investasi memiliki probabilitas 0,000 dimana hal ini membuktikan bahwa Investasi tidak berada dilevel signifikansi sehingga dapat disimpulkan nilai probablitas lebih kecil dibandingkan signifikansi (0,000<0,05) yang berarti hubungan Investasi terhadap desentralisasi fiskal memiliki pengaruh signifikan. Dalam tabel ditunjukkan bahwa koefisien dari penerimaan bernilai positif, hal ini menggambarkan bahwa setiap terjadinya peningkatan investasi, maka akan meningkatkan ekonomi sebesar 0,2397704.

Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil dari output regresi dengan metode Random Effect pada variabel independent Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki probabilitas 0,426 dimana hal ini membuktikan bahwa TPAK tidak berada di level signifikansi sehingga dapat disimpulkan nilai probabilitas lebih besar dibandingkan signifikansi ($0,426 < 0,05$) yang berarti hubungan TPAK terhadap desentralisasi fiskal tidak memiliki pengaruh signifikan.

PEMBAHASAN

Pembahasan Pertumbuhan Ekonomi dan Desentralisasi Fiskal pada Prov. Jawa Tengah Periode 2017-2020

Berdasarkan data yang telah diperoleh, rata-rata pertumbuhan ekonomi pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2017 hingga 2018 mengalami peningkatan. Namun pada data juga diperoleh bahwa terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang selalu mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sejak 2017 hingga 2019 yang diantaranya adalah Kab. Sukoharjo, Kab. Sragen, Kab. Rembang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Sementara pada periode 2019-2020 hampir seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 7. PDRB Kab/Kota Prov. Jawa Tengah Periode 2017-2019

Tahun	Harga Berlaku	Pertumbuhan
2017	IDR 33.484.771	7,95%
2018	IDR 36.215.254	8,28%
2019	IDR 38.885.294	7,43%
2020	IDR 38.471.561	-0,47%
2021	IDR 40.605.164	5,64%
2022	IDR 44.609.094	9,90%
	Rata-Rata	6,45%

Sumber: Jateng.bps.go.id

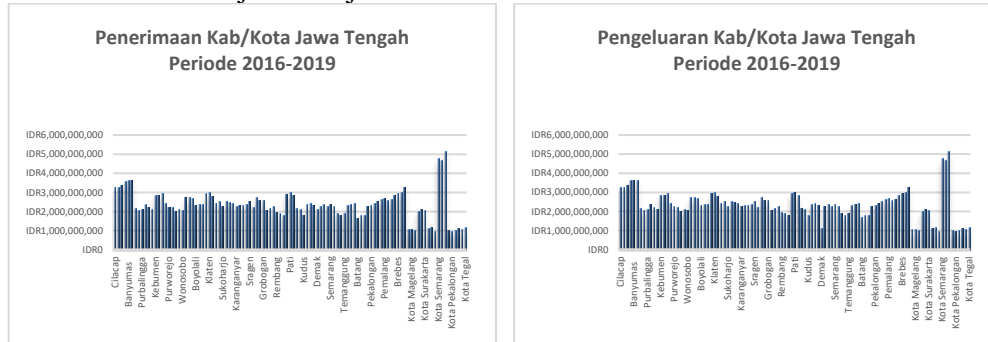
Melalui data yang disajikan pada table 7, Desentralisasi fiskal yang dilakukan pada provinsi Jawa Tengah dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan PDRB dengan rata-rata 6,45% selama periode 2017-2022.

Ditengah pembangunan berkelanjutan sebagai visi dari pemerintah untuk mencapai Indonesia emas, melalui desentralisasi fiskal, pendanaan yang dialokasikan kepada daerah juga diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui ketersediaannya barang publik. Pengeluaran public akan semakin meningkat dari saat ini hingga kemasa yang akan datang. Dengan adanya desentralisasi fiskal secara signifikan maka penggabungan dengan pemerintah lokal dapat mengurangi pengeluaran sehingga memberikan dampak yang lebih intensif terhadap barang publik (Canh & Thanh, 2019). Namun demikian, ketersediaan barang public yang optimal tetap memerlukan dana yang cukup besar untuk pembangunannya sehingga setiap daerah selalu mengharapkan penerimaan dana yang lebih besar. Disisi lain, kenaikan jumlah alokasi TKDD yang diberikan kepada pemerintah daerah terbilang cukup kecil yang mana dana tersebut hanya mengalami kenaikan sebesar 5% setiap tahunnya (DJPK, 2020). Ditambah lagi dengan adanya kebijakan yang bertumpu pada UU No. 28 Tahun 2009 terkait pajak daerah dan retribusi daerah dimana ruang gerak untuk menciptakan sumber penerimaan pada pemerintah daerah dibatasi sehingga hal ini menyebabkan terjadinya ketergantungan fiskal bagi pemerintah daerah. Namun dalam hal ini pemerintah memiliki beberapa fungsi utama yang dapat digunakan untuk mengelola perekonomian guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Fungsi-fungsi diantaranya terkait alokasi sumber daya, distribusi, regulasi dan stabilisasi. Keempat hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai upaya mengoptimalkan fungsi publik dan pembangunan berkelanjutan dengan tujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang efektif dan efisien.

Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Jawa Tengah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan dan pengeluaran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi dapat membuat pemerintah lebih responsive dan

akuntabel sehingga tercipta tata kelola yang baik (Faguet, 2014). Pada dasarnya pemerintah daerah memiliki potensi yang cukup besar untuk dapat mengelola sumber dayanya secara mandiri dan mempergunakannya untuk kepentingan rakyat secara maksimal. Hal ini tentunya juga didukung dengan adanya pemerintahan yang memiliki tata kelola yang baik sesuai dengan pendapat (Ivanyna & Shah, 2013) yang menyatakan bahwa peran dari pemerintah merupakan hal yang sangat penting untuk membuat suatu kebijakan berjalan efektif.

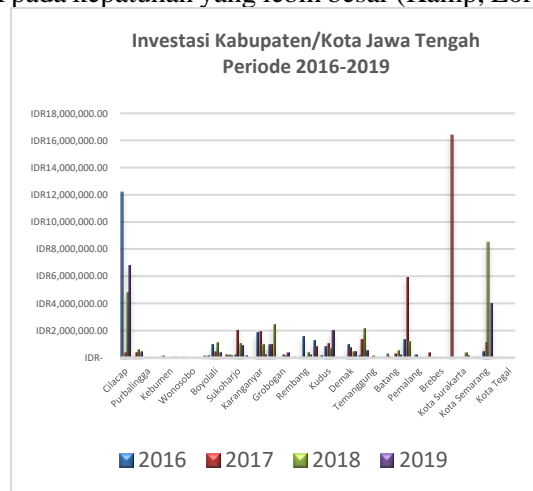


Gambar 2. Penerimaan Daerah Kab/Kota Jateng Gambar 3. Pengeluaran daerah Kab/Kota Jateng
Sumber: Jateng.bps.go.id

Gambar 2 dan 3 menunjukkan bahwa penerimaan dan pengeluaran terbesar berada di Kota Semarang yang mana hal ini dapat disebabkan karena kota Semarang merupakan salah satu kota terbesar dengan jumlah penduduk sebesar 1.674.358 jiwa per Desember 2019 (Dispendukcapil, 2019). Bersama dengan pemimpin daerah, pada tahun 2019, Kota Semarang mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,52% bersamaan dengan pertumbuhan investasi, penurunan angka kemiskinan, serta penurunan wilayah kumuh, banjir dan kondisi jalanan yang rusak (Permadi, 2019). Pemerintah Kota Semarang terus mengembangkan pembangunan yang dapat bermanfaat besar bagi daerahnya. Kondisi ini membuktikan bahwa dengan adanya desentralisasi fiskal, pengelolaan daerah terhadap penerimaan dan pengeluaran menjadi lebih efektif dan efisien yang mana hal ini bersamaan dengan adanya sumber daya dalam pemerintahan yang kompeten dan dapat melayani dengan baik masyarakat di daerahnya. Hal ini didukung oleh pernyataan (Kyriacou, 2011) dan (Goel, Mazhar, Nelson, & Ram, 2017) bahwa desentralisasi fiskal ini akan meningkatkan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien.

Perkembangan Investasi pada Provinsi Jawa Tengah

Dalam upaya menciptakan ekonomi yang berkelanjutan, maka investasi daerah merupakan hal yang sangat penting untuk membantu menunjang pembangunan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kota yang besar dan memiliki kekuatan fiskal, adanya peningkatan investasi akan berdampak pada kepatuhan yang lebih besar (Kamp, Lorentzen, & Mattingly, 2017).



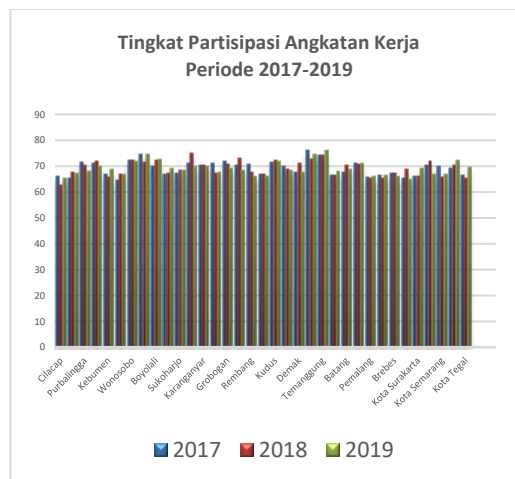
Gambar 4. Investasi Kab/Kota Jawa Tengah Periode 2016-2019 (Sumber: Jateng.bps.go.id)

Grafik Investasi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2019 menunjukkan bahwa nilai investasi terbesar berada di Cilacap, Pekalongan, Kota Magelang dan Kota Semarang. Investasi yang tinggi ini tentu juga dapat memberikan keuntungan bagi pengusaha untuk melakukan ekspansi atas bisnisnya sehingga hal ini akan berdampak pada meningkatnya produktivitas dari masyarakat.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Tengah. Investasi juga memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Kondisi seperti ini dapat disebabkan oleh investasi asing yang mana juga berdampak pada meningkatnya produksi barang dan jasa yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Astuti, 2018). Berdasarkan grafik Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2019 menunjukkan bahwa terdapat daerah-daerah dengan nilai investasi yang cukup besar seperti Cilacap, Pekalongan, Kota Magelang dan Kota Semarang. Keempat wilayah tersebut dapat dijadikan perhatian oleh pemerintah untuk memaksimalkan penedapatan dengan memberikan fungsi publik atau pelayanan publik yang memadai untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi.

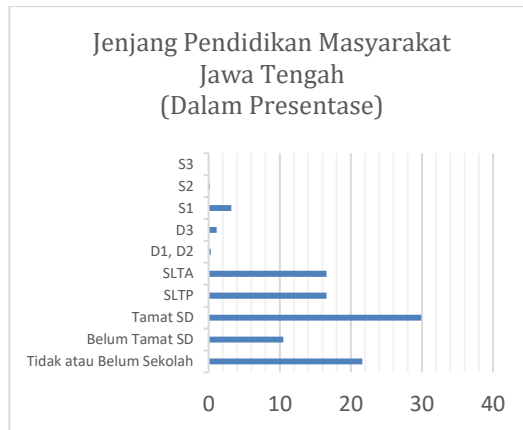
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah cukup tinggi. Hal ini digambarkan melalui grafik sebagai berikut



Gambar 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab/Kota Prov. Jawa Tengah
Sumber: Jateng.bps.go.id

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja yang cukup tinggi ini dapat dipengaruhi karena adanya bonus demografi yang mana kelompok usia produktif saat ini lebih mendominasi dibandingkan dengan usia tidak produktif. Namun demikian, hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada wilayah Jawa Tengah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi. Dimana Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh (Wahyuningtias, 2019) terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja khususnya di wilayah jawa yang diantaranya seperti pendidikan dan rumah tangga. Tingkat pendidikan yang tinggi atau semakin tinggi jenjang pendidikan individu, maka akan berdampak pada kesempatan kerja seorang individu semakin luas, begitupula sebaliknya. Adapun jumlah TPAK yang semakin kecil apabila semakin banyak tiap anggota keluarga yang mengurus rumah tangga.



Gambar 6. Jenjang Pendidikan Masyarakat Kab/Kota Prov. Jawa Tengah

Sumber: databoks.katadata.co.id

Melalui grafik 6 diketahui bahwa jenjang pendidikan masyarakat pada provinsi Jawa Tengah didominasi oleh tamatan sekolah dasar dengan jumlah presentase sebesar 29,88 persen (Kusnandar, 2021). Disamping itu, (Wahyu, 2016) menyatakan bahwa mayoritas pekerja di Jawa Tengah merupakan lulusan sekolah dasar dimana dalam hal sikap untuk memilih pekerjaan mereka berbeda dengan lulusan perguruan tinggi, penduduk dengan lulusan sekolah dasar cenderung tidak menentukan secara tepat jenis pekerjaan mereka sehingga hal ini membuktikan bahwa produktivitas pekerja masih terbilang rendah yang mana hal ini juga mempengaruhi upah dan dampaknya terhadap kesejahteraan mereka yang juga rendah.

Dengan demikian, pemerintah daerah dapat turun secara langsung untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan mempermudah akses pendidikan bagi masyarakat daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk masuk kedalam pasar kerja dan mampu bersaing dengan masyarakat luas. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus lebih siap untuk menyediakan lapangan pekerjaan guna memitigasi adanya ketimpangan pendapatan antar masyarakat. Adanya desentralisasi fiskal dapat dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian (Pike, Pose, Tomany, Torrisi, & Tselios, 2012) yang menyatakan bahwa pendapatan desentralisasi yang meningkat dapat menurunkan ketimpangan.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Desentralisasi fiskal dan Investasi berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Jawa Tengah. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat mengelola dengan bijak penerimaan daerah. Selain itu, pemerintah juga perlu mengoptimalkan dan mengevaluasi secara berkala pengeluaran yang dilakukan oleh daerahnya sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat agar desentralisasi fiskal dapat berjalan dengan baik melalui fasilitas publik yang memadai dan tersebar secara merata. Hal ini sebab pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi setiap daerah. Disamping itu, diperlukan juga Sumber Daya yang kompeten dan akuntabel untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

REFERENSI

- A, R. (2013). *Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi serta Kaitannya dengan Otonomi Daerah*. Retrieved from samarinda.lan.go.id: <http://www.samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/124/122>
- Andreas, K. P., & Oriol, S. R. (2011). Fiscal Decentralization and Government Quality in The OECD. *Economics Letters*, 191-193.
- Annisa. (2023, Agustus). *Pengertian Otonomi Daerah*. Retrieved from Fakultas Hukum UMSU: <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-otonomi->

- Faguet, J. P. (2014). Decentralization and Governance. *World Development*, 2-13.
- Firman, T., Hudalah, D., & Talitha, T. (2020). Welcoming Two Decades of Decentralization in Indonesia: A Regional Development Perspective. *Territory, Politics, Governance*, 690-708.
- Fitriani. (2013, February). *Perhitungan dan Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota Berdasarkan Harga Konstan*. Retrieved from eprints.undip: <http://eprints.undip.ac.id/42333/1/Fitriani.pdf#:~:text=Menurut%20BPS%2C%20PDRB%20adalah%20jumlah%20nilai%20tambah%20yang,salah%20satu%20indikator%20pertumbuhan%20ekonomi%20di%20suatu%20wilayah>.
- George, H. W., & Mehmet, T. S. (2011). The Impact of Local Decentralization on Economic Growth: Evidence From U.S Counties. *Journal of Regional Science*, 47-64.
- Goel, R. K., Mazhar, U., Nelson, M. A., & Ram, R. (2017). Different forms of decentralization and their impact on government performance: Micro-level evidence from 113 countries. *Economic Modelling*, 171-183.
- Gray, B. (1985). Conditions Facilitating Interorganizational Collaboration. *Sage Journals*.
- Hankla, C. R., Ortiz, E. H., Rodriguez, R. A., & Vazquez, J. M. (2018). Rethinking The Political Economy of Decentralization: How Election and Parties Shape The Provision of Local Public Goods. *Publius*, 523-558.
- Ivanyna, M., & Shah, A. (2013). How Close Is Your Government to Its People? Worldwide Indicators on Localization and Decentralization. *Economics Discussion Paper*.
- Jaya, W. K., & Sabila, K. (2014, April). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional Di Indonesia*. Retrieved from journal.umy.ac.id.
- Kamp, D. V., Lorentzen, P., & Mattingly, D. (2017). Racing to the Bottom or to the Top? Decentralization, Revenue Pressures, and Governance Reform in China . *World Development*, 164-176.
- Kenda, A. S., & Nadzir, M. (2023). Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri : Pengaruhnya pada Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*. Retrieved from JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi): <https://ejournal.undiksha.ac.id>
- Kharisma, B. (2013, September). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 101-119. Retrieved from Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan: <file:///Users/indirautomo/Downloads/1249-3512-1-SM.pdf>
- Kindangen, P., Mirah , M. R., & Rororong, I. P. (2020). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara. *E-Journal Unsrat*. Retrieved from E-Journal Unsrat: <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Kresnandra, A. (2016, Juni). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi*. Retrieved from Jurnal.unmer.ac.id: <file:///Users/indirautomo/Downloads/410-873-1-SM.pdf>
- Kusnandar, V. B. (2021, Desember). *Jumlah Penduduk Jawa Tengah Menurut Jenjang Pendidikan (2021)*. Retrieved from databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/10/terdapat-3816-penduduk-jawa-tengah-yang-berpendidikan-hingga-s3>
- Kyriacou, A. P. (2011). Fiscal and Political Decentralization and Government Quality. *Environment and Planning C : Government and Policy*, 204-223.
- Martadisastra, D. (2011). *Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Persaingan*. Retrieved from kppu.go.id: <https://kppu.go.id/blog/2011/08/pertumbuhan-ekonomi-dan-kebijakan-persaingan/>
- Maulana, A. (2022). *Pakar Unpad: Ekonomi Berkelanjutan Antisipasi Dampak Pertumbuhan Ekonomi*. Retrieved from UNPAD: <https://www.unpad.ac.id/2022/09/pakar-unpad-ekonomi-berkelanjutan-antisipasi-dampak-pertumbuhan-ekonomi/>

- Mukarromah, A. (2019, Januari). *Membongkar Penyebab Hambatan Desentralisasi Fiskal*. Retrieved from DDTC News: <https://news.ddtc.co.id/membongkar-penyebab-hambatan-desentralisasi-fiskal-14784>
- Nurhadi, Nurlailah, & Syamsul. (2022, July). Krisis Pandemi Covid-19: Dampaknya Pada Pendapatan Daerah Dari Sektor Perpajakan dan Retribusi. *Keunis*, 1-10. Retrieved from [neliti.com: https://www.neliti.com/publications/496991/krisis-pandemi-covid-19-dampaknya-pada-pendapatan-daerah-dari-sektor-perpajakan](https://www.neliti.com/publications/496991/krisis-pandemi-covid-19-dampaknya-pada-pendapatan-daerah-dari-sektor-perpajakan)
- Pal, S., & Wahhaj, Z. (2017). Fiscal Decentralization, Local Institution and Public Goods Provision: Evidence From Indonesia. *Journal of Comparative Economics*, 383-409.
- Pasaribu, M. (2022, April). *UU HKPD: Re-Design Desentralisasi Fiskal*. Retrieved from Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan: <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3890-uu-hkpd-re-design-desentralisasi-fiskal.html>
- Permadi, G. (2019, Oktober 15). *Dirjen Otda Akui Kemajuan Kota Semarang Bersama Hendi*. Retrieved from TribunJateng: <https://jateng.tribunnews.com/2019/10/15/dirjen-otda-akui-kemajuan-kota-semarang-bersama-hendi?page=1>
- Pike, A., Pose, A. R., Tomany, J., Torrissi, G., & Tselios, V. (2012). Income Inequality, Decentralization and Regional Development in Western Europe. *Environment and Planning A*, 1278-1301.
- Rahmanda, A. A., & Fahzaalloh, A. M. (2018, Mei). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Papua. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Retrieved from [Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB: file:///Users/indirautomo/Downloads/4819-9375-1-SM%20\(1\).pdf](file:///Users/indirautomo/Downloads/4819-9375-1-SM%20(1).pdf)
- Rodden, J., & Wibbels, E. (2010). Fiscal Decentralization and The Business Cycle: An Empirical Study of Seven Federation. *Economics and Politics*, 37-67.
- Rustan. (2013). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi, Serta Kaitannya dengan Otonomi Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*. Retrieved from [Jurnal Borneo Administrasi: http://www.samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/124/122](http://www.samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/124/122)
- Sari, A. M. (2023, Agustus). *Pengertian Otonomi Daerah*. Retrieved from [fahum.umsu.ac.id: https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-otonomi-daerah/#:~:text=Otonomi%20daerah%20adalah%20pemberian%20kewenangan,yang%20berkaitan%20dengan%20kepentingan%20lokal](https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-otonomi-daerah/#:~:text=Otonomi%20daerah%20adalah%20pemberian%20kewenangan,yang%20berkaitan%20dengan%20kepentingan%20lokal).
- Sari, L. F. (2019). Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja dan Human Capital Investment terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Bandar Lampung Tahun 2010-2017 Perspektif Ekonomi Islam. *repository radenintan*. Retrieved from [repository radenintan: http://repository.radenintan.ac.id/8203/1/SKRIPSI%20FIX.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/8203/1/SKRIPSI%20FIX.pdf)
- Vazquez, J. M. (2017). The Impact of Fiscal Decentralization: A Survey. *Journal of Economic Surveys*, 1095-1129.
- Wahyu, F. (2016, Mei). *Mayoritas Pekerja Jawa Tengah Lulusan SD*. Retrieved from [liputan6: https://www.liputan6.com/regional/read/2500931/mayoritas-pekerja-jawa-tengah-lulusan-sd](https://www.liputan6.com/regional/read/2500931/mayoritas-pekerja-jawa-tengah-lulusan-sd)
- Wahyuningtias, R. (2019). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Pulau Jawa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. Retrieved from [Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya: https://jimfeb.ub.ac.id](https://jimfeb.ub.ac.id)
- Zuraya, N. (2020, Juni). *Kemenkeu: Pendapatan Daerah Turun 15,81 Persen*. Retrieved from [Republika: https://ekonomi.republika.co.id/berita/qbcfu9383/kemenkeu-pendapatan-daerah-turun-1581-persen](https://ekonomi.republika.co.id/berita/qbcfu9383/kemenkeu-pendapatan-daerah-turun-1581-persen)